

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu daerah yang menyimpan potensi tambang mineral dengan bahan galian logam dan non logam meliputi emas, tembaga, galena, mangan, batu gamping, andesit, trass, pasir kuarsa, sirtu, bentonite, tanah liat, kaolin, kalsit, damar, fosfat, batu permata, oker, tuf, dasit, dan diorite. Dengan adanya potensi tersebut menjadi lahan bagi berkembangnya industri pertambangan yang beresiko tinggi dan padat modal (Idris, 2013:52). Sebenarnya potensi tambang di Wonogiri cukup besar, namun pengelolaannya belum maksimal karena masih banyak PETI (Pertambangan Tanpa Izin). Sebelum terjadi sentralisasi kewenangan perizinan usaha pertambangan di Pemerintah Pusat, mulanya izin pertambangan berada di Pemerintah Provinsi. Namun, karena kondisi pertambangan daerah yang tidak kondusif akhirnya perizinan usaha ditarik ke Pemerintah Pusat. Akan tetapi sentralisasi tersebut semakin membuat kekhawatiran karena kewenangan perizinan usaha sekaligus pengawasan jauh dari jangkauan daerah sehingga berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Pada perizinan usahanya, tambang di Wonogiri ini telah melewati tiga periode perizinan yakni di lingkup Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Disinyalir terdapat aktor-aktor yang terlibat di dunia pertambangan yang memiliki pengaruh signifikan terkait perizinan usaha tambang. Untuk di Kabupaten Wonogiri sendiri keterlibatan aktor masih semu, sehingga perlu ditelisik secara mendalam apalagi setelah terjadinya sentralisasi perizinan

di Pemerintah Pusat. Untuk pertambangan yang ada di Kabupaten Wonogiri ini, dalam pengelolaannya dilakukan oleh perusahaan/badan usaha yang luas usahanya besar hingga kecil sekalipun, Selain dikelola oleh perusahaan, juga terdapat pertambangan yang dikelola oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pertambangan menjadi sumber profit yang besar karena memiliki nilai jual yang tinggi dengan menggunakan cara pandang pembangunan yang cenderung berwatak ekonomistik.

Dalam pertambangan, perizinan usaha terbagi ke dalam beberapa jenis diantaranya terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan yang terakhir 3)Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (Lathif, 2017:154). Ketiganya memiliki ketentuan masing-masing dalam menjalankan aktivitas pertambangan. Terkait dengan perizinan, idealnya itu ketika ingin melakukan aktivitas pertambangan diharuskan mematuhi dan memenuhi persyaratan yang telah diberlakukan baik itu secara administratif, teknis, lingkungan hingga finansial. Ketika membahas soal perizinan, ini tidak terlepas dari adanya pemilik kewenangan yang tugasnya melakukan penerbitan izin. Dalam hal ini adalah pemerintah yang berperan penting untuk memberikan izin kepada masyarakat atau badan usaha yang hendak melakukan aktivitas tambang diiringi dengan adanya mekanisme yang ketat.

Secara histori untuk Pemerintah Kabupaten Wonogiri berkaitan dengan perizinan usaha pertambangan, pihaknya mengeluarkan keputusan untuk mencabut Perda (Peraturan Daerah) dengan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral pada tahun 2017, keputusan itu berdasarkan pada lampiran dalam perundang-undangan dengan Nomor 23 Tahun 2014 pada huruf CC terkait pembagian urusan pemerintah khususnya dengan fokus di bidang energi dan sumber daya mineral. Dari pembagian tersebut Pemerintah Kabupaten memiliki keterbatasan dan hanya memiliki suatu kewenangan sebatas rekomendasi perizinan, selebihnya kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan berada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sehingga perizinan usaha tambang di Kabupaten Wonogiri diajukan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Provinsi Jawa Tengah.

Dengan menjamurnya pertambangan ilegal, Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebenarnya sempat dihimbau oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberi kemudahan dalam pemberian izin agar nantinya dapat berdampak baik bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Mengingat sejak tahun 2017 sudah banyak perusahaan tambang yang mengajukan izin, namun belum mendapatkan Informasi Tata Ruang (ITR) dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebab pemberian WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) atas rekomendasi kabupaten. Walaupun begitu, dengan keterbatasan Pemerintah Kabupaten dalam mengelola pertambangan, bahwasanya perizinan usaha yang langsung diterbitkan di level Pemerintahan Provinsi pihaknya tidak diberikan tembusan perihal izin-izin perusahaan/badan usaha maupun rakyat yang ada di Kabupaten Wonogiri, sehingga tidak mengetahui kondisi izin tambang secara mendetail.

Studi terdahulu di Kabupaten Wonogiri terdapat perizinan usaha pertambangan dari CV. Selo Putro, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah perizinan usaha tambang dialihkan mulanya di kabupaten menjadi tingkat provinsi termasuk pengawasan dan pembinaannya (Handayani, 2015:12). Pada pelaksanaannya terkait penerbitan izin hingga pelaporan kewajiban RKAB (Rencana Kerja Anggaran Belanja) masih terdapat ketimpangan dan untuk pengawasan serta pembinaan juga tidak berjalan intensif. Apalagi saat ini terjadi peralihan kewenangan untuk menerbitkan izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara bahwa penerbitan izin, pengawasan dan pembinaan usaha tambang yang mulanya menganut asas desentralisasi menjadi sentralisasi. Urusan seputar perizinan usaha tambang tidak lagi di pegang oleh

Pemerintah Daerah level provinsi, melainkan Pemerintah Pusat dengan sebuah harapan untuk melakukan pemangkasan perizinan yang berbelit dan hiper-regulasi.

Namun yang menjadi persoalan bahwasanya UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi menjunjung adanya desentralisasi yang diatur pada pasal 18 UUD 1945, sehingga ini menimbulkan tidak kondusifnya kebijakan pertambangan (Luhukay & Dewi, 2020:269). Apalagi mengingat wilayah Indonesia ini sangat luas dan begitu juga potensi pertambangannya sangat besar tersebar di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Wonogiri, jika semua perizinan di sentralisasi efektifitasnya perlu dipersoalkan, sejauh mana peran pemerintah pusat dalam mengelola perizinan usaha tambang.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Pertambangan yang dilakukan di Kabupaten Wonogiri terdapat dua aktivitas dengan perizinan dan tanpa perizinan yang dilakukan oleh perusahaan/badan usaha dan tambang rakyat secara tradisional. Sehingga dalam hal ini dengan adanya sentralisasi perizinan pertahun 2020, peneliti ingin menelusuri lebih dalam pertambangan yang ada di Kabupaten Wonogiri terkait dampak sentralisasi izin usaha pertambangan maka dari itu diperlukan fokus pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan usaha pertambangan pasca diberlakukan sentralisasi kebijakan perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Wonogiri?
2. Siapa saja aktor-aktor yang diuntungkan maupun dirugikan dari sentralisasi kebijakan perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Wonogiri?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Secara Umum

Dengan penelitian ini, tujuan umum yang hendak dicapai oleh peneliti adalah ingin mengetahui peta kekuatan lembaga yang memiliki kewenangan dalam perizinan usaha tambang semenjak terjadinya sentralisasi perizinan. Kemudian juga ingin mengetahui bagaimana berjalannya perizinan pasca sentralisasi dan penerapannya bagi usaha tambang di Kabupaten Wonogiri.

1.3.2 Tujuan Secara Khusus

Sedangkan tujuan secara khusus, ingin mengetahui kondisi perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Wonogiri pasca sentralisasi dan tata kelolanya apakah semakin kondusif atau semakin membuat maraknya PETI (Pertambangan Tanpa Izin) . Selain itu juga ingin mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam pertambangan baik yang diuntungkan maupun dirugikan dengan adanya sentralisasi perizinan usaha tambang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari penelitian yang sudah dilakukan ini, peneliti mendedikasikan butir-butir pemikiran yang telah dikemas sedemikian rupa tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Wonogiri agar nanti dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya atau akademisi lainnya sebagai sumber informasi yang dapat digunakan, sehingga dapat memberikan sumbangsih untuk mengetahui bagaimana dampak sentralisasi perizinan tambang bagi usaha tambang di Kabupaten Wonogiri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian yang telah selesai terlaksana, peneliti memiliki harapan besar agar tulisan ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang dampak sentralisasi perizinan

usaha pertambangan bagi usaha tambang di Kabupaten Wonogiri. Sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pemerintah atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan dalam perizinan usaha pertambangan dan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan selanjutnya.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Implementasi Kebijakan Publik

Studi implementasi mengenai kebijakan ini sejatinya memiliki banyak sekali model, masing-masing memiliki perbedaan. Namun semuanya sama halnya bertujuan untuk digunakan sebagai pisau analisis sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kegagalan dari penerapan/implementasi suatu kebijakan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari adanya proses politik, sebab Implementasi sendiri merupakan sebuah cara agar kebijakan yang diinisiasi atau dirancang dapat berjalan dan dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya sesuai rencana sebelumnya. Berbicara mengenai implementasi kebijakan sebenarnya terdapat dua macam cara yang dilakukan dengan menuangkan pemikiran melalui bentuk sebuah program-program, dan melalui adanya formulasi kebijakan publik *derivate* atau turunan, akan tetapi ini bergantung pada pihak yang memiliki kewenangan.

Implementasi kebijakan, pada dasarnya tidak akan pernah dimulai sebelum ada tujuan-tujuan dan pastinya sasaran untuk ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Idealnya sebelum dilakukan pengimplementasian kebijakan, perlu mengacu pandangan dari pakar atau perspektif masyarakat sebagai sasaran kebijakan, agar nantinya dalam pelaksanaan dapat berjalan lancar meminimalisir terjadinya bentrok kepentingan sehingga dapat sesuai dengan apa yang diharapkan bersama bukan golongan orang tertentu. Karena dengan adanya

kebijakan memiliki tujuan untuk menentukan arah dari lingkup persoalan yang ada dimasyarakat dan sebagai solusi untuk menyelesaikan suatu persoalan bukan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dan cenderung merugikan masyarakat.

Dalam perkembangannya, kebijakan tidak terlepas dari adanya dua disiplin ilmu yakni ilmu politik dan juga ilmu administrasi, keduanya memiliki keterkaitan erat dan saling bersinggungan (Kurniadi, 2018:572). Secara singkat kebijakan itu tercipta karena adanya proses pengambilan keputusan apa yang hendak dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan, dan sesungguhnya pengambilan kebijakan ini merupakan tanggungjawab penguasa. Mengingat adanya sebuah kebijakan ini merupakan penghubung antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan melihat hasil kegiatan dari pemerintah itu sendiri, apa berjalan baik atau sebaliknya. Tetapi juga terdapat sumber permasalahan yang mengiringi proses implementasi suatu kebijakan diantaranya adalah masalah perihal komunikasi, sikap birokrasi, sumber daya dan struktur organisasi sehingga seringkali membuat implementasi kebijakan tidak berjalan maksimal, karena sejatinya dalam konteks lingkungannya itu berdinamika dan tidak statis

Pada negara dunia ketiga atau berkembang kebijakan dibuat cenderung sesuai apa yang diinginkan pembuat kebijakan, acapkali terjadi pengebirian kebijakan pemerintah seperti kurangnya personel yang berkualitas, tidak memadainya proses arahan dan kontrol dari pemimpin politik, adanya oposisi terhadap kebijakan, terjadi korupsi dan lain sebagainya (Smith, 2016:199). Seperti halnya Indonesia baik ditingkat nasional hingga daerah berjalannya kebijakan penuh dengan dinamika. Adanya suatu kelompok kepentingan dan kelompok penekan dalam iklim demokratisasi, memungkinkan bila kebijakan dimodifikasi menyesuaikan kepentingan kelompok. Dalam mengembangkan proses pengimplementasian kebijakan perlu melihat dari sudut pandang sosial dan politik untuk mendukung pola interaksi sebab masing-

masing individu bahkan kelompok tentunya memiliki persepsi yang berkaitan dengan kebijakan. Sehingga perlu untuk ditelusuri lebih jauh dan dievaluasi sebab keberhasilannya tidak sekedar dalam aspek pembiayaan, namun juga perlu meminimalisir adanya suatu perbedaan dari kelompok sasaran.

1.5.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Dalam mencari korelasi antara permasalahan yang diteliti dengan teori yang digunakan sebagai landasan berpikir. Penulis menggunakan teori menurut Merilee S. Grindle, bahwasanya menurut Grindle berbicara terkait politik implementasi kebijakan menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan baru-baru ini, dimulai dari kesiapan sumber daya yang proporsional hingga secara struktur hubungan antar pemerintah beserta komitmen dan pengaruhnya (Grindle,1980:3). Sejatinya implementasi kebijakan merupakan realisasi dari hasil efektifitas lembaga pelaksana atau pemerintah yang kemudian diterjemahkan, ini mengakibatkan perubahan sebagai hasil dari adanya kebijakan. Seringkali kesesuaiannya tidak sempurna antara kebijakan dengan layanan yang diberikan, dan ketika berhasil untuk diimplementasikan ini juga bergantung pada kontribusi dan keterlibatan banyak pihak, baik itu peran dari daerah hingga kelompok sasaran.

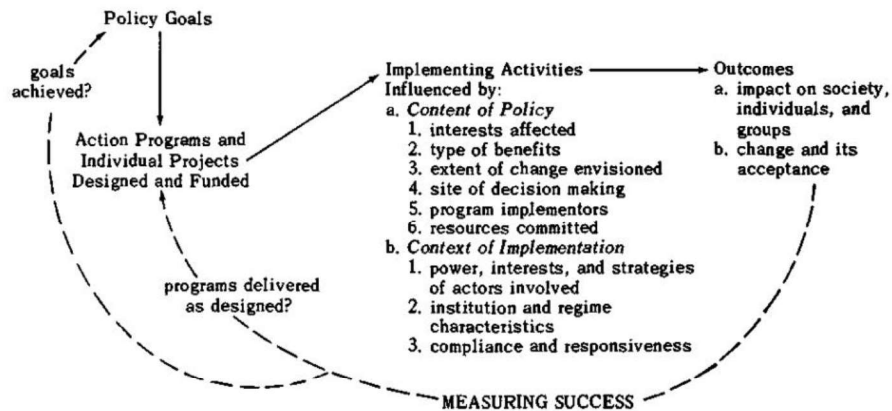
Perlu diketahui bahwa implementasi kebijakan bisa dibilang adaptif terhadap dimana kebijakan itu dijalankan karena mulanya berangkat dari persoalan-persoalan yang hadir, sehingga ingin memperbaiki kondisi. Terlebih lagi adanya implementasi kebijakan ini juga dikaitkan dengan rezim politik yang sedang berkuasa sehingga dapat dievaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan begitu pun juga kegagalannya. Mengingat sering adanya disparitas antara tujuan dari kebijakan dan hasil. Pada tahap perumusan sudah pasti melibatkan banyak aktor yang mencoba untuk mempengaruhi keputusan. Sehingga dengan adanya sebuah kebijakan dapat diketahui siapa penanggungjawabnya dan siapa yang bertugas melaksanakan kebijakan

tersebut. Walaupun begitu partisipasinya seringkali masih terbatas pada pembuat kebijakan, padahal banyak keinginan para masyarakat yang hendak berkontribusi dalam pengambilan keputusan karena hasil dari kebijakan mempengaruhi masyarakat itu sendiri (Grindle, 1980;17). Dalam hal ini dapat diartikan bahwa para pembuat kebijakan diminta membuka ruang demokratis guna menghimpun partisipasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku penerima kebijakan dan tidak sekadar menguntungkan pemerintah.

Terlebih lagi untuk mendapatkan kepatuhan dari kebijakan harus mendapat dukungan elit politik dan badan pelaksana, karena pencapaian dapat berhasil ketika daya patuhnya baik. Meskipun begitu isi kebijakan juga perlu diperhatikan karena merupakan hal yang krusial, dampaknya luas bagi masyarakat. Yang menjadi perhatian bahwasanya kebijakan tidak terlepas dari adanya sistem politik baik yang memusatkan kekuasaan atau melakukan pendelegasian untuk mengukur pencapaian. Sehingga implementasi kebijakan sebagai proses politik ini sifatnya fleksibel dalam pelaksanaannya sebagai bentuk resolusi konflik (Grindle, 1980;18). Konflik tersebut bisa karena adanya kendala komunikasi, bahwasanya rencana tingkat nasional tidak disesuaikan dalam tingkat lokal

Dalam tingkat lokal sebagai pelaksana ditugasi oleh tingkat nasional untuk melakukan tugas sesuai dengan tujuan kebijakan yang dikemas oleh aktor politik para pembuat kebijakan dalam undang-undang atau rencana program tertentu(Grindle, 1980;197). Sehingga para pelaksana tingkat lokal berperan penting baik terhadap kegagalan atau tidaknya kebijakan, meskipun begitu seringkali perdamaian lebih dijunjung tinggi dari pada sekadar kemajuan pembangunan. Gambar dibawah ini adalah bagan dari Merilee. Grindle tentang suatu implementasi kebijakan:

Figure 1-1. Implementation as a Political and Administrative Process



Gambar 1.1 Bagan Teori Merile S Grindle 1

Dari gambar tersebut, dapat dikatakan menurut pendapat dari Grindle model suatu implementasi kebijakannya, itu dipengaruhi oleh adanya dua variabel besar yakni yang pertama berupa isi atau konten kebijakan dan kedua adalah konteks implementasi. Yang mana menjadi perhatian bagaimana pengaruh konten terhadap implementasinya dan bagaimana konteks politik tindakan dapat mempengaruhi. Variabel tersebut mencakup beberapa hal yang dirinci diantaranya pada isi atau konten kebijakan meliputi:

1) Implementasi kebijakan menurut Grindle itu bergantung pada sebuah *interest* atau kepentingan yang mempengaruhi. Dimana hal ini akan dilihat sejauh mana suatu kepentingan yang ada itu dapat termuat dalam isi kebijakan itu sendiri, sebab dengan adanya kepentingan memiliki kaitan dengan beragam kepentingan yang punya pengaruh terhadap suatu pengimplementasian kebijakan. Pada poin ini bahwasanya dalam pelaksanaannya sudah pasti banyak keterlibatan kepentingan dan dengan poin ini dapat dilihat sejauh mana pengaruh yang dibawa oleh kepentingan-kepentingan tersebut.

2) Tipe atau jenis manfaat yang diperoleh, pada kali ini berhubungan tentang apa saja utilitas positif hasil dari para pelaksana kebijakan dan apa dapat diterima oleh kelompok kepentingan. Lebih jelasnya berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan manfaat yang telah

termuat dalam isi yang nantinya dalam pengimplementasian kebijakan yang akan dilakukan memiliki dampak baik dan memiliki kegunaan.

3) Derajat perubahan yang diinginkan atau dicapai, yang mana pada poin ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang dirancang itu sudah pasti memiliki suatu target yang ingin dicapai dan dijelaskan terkait bagaimana perubahan yang diharapkan dari adanya suatu kebijakan. Karena sejatinya kebijakan itu haruslah jelas untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dari pada sebelumnya. Melalui ini maka akan dilihat untuk derajat perubahannya baik itu dengan sikap atau perilaku kelompok dari adanya suatu program, yang mana ini sulit dilakukan karena berubah-ubah.

4) Tata letak pengambilan suatu keputusan, yang mana pada tahap pengambilan sebuah keputusan ini memiliki peran vital dari adanya kebijakan, atau dapat dikatakan sangat berperan penting. Maka karenanya mengharuskan untuk melakukan sebuah penjelasan dengan rinci mengenai pengambilan keputusan dari adanya sebuah kebijakan.

5) Pelaksana program atau kebijakan, dalam pengimplementasian kebijakan maka membutuhkan adanya pelaksana yang memiliki kompetensi mumpuni demi keberhasilan dan tercapainya kebijakan. Pada intinya pelaksana kebijakan harus memahami betul apa saja yang harus dilakukan untuk merealisasikan kebijakan agar dapat terimplementasi secara baik.

6) Sumber daya yang digunakan atau turut dilibatkan, pada poin ini menjelaskan bahwa apakah kebijakan didukung oleh adanya sumber daya yang memadai atau ideal agar memperlancar jalannya pelaksanaan. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa materiil atau non materiil.

Disisi lain juga terdapat variabel konteks implementasi:

1) Dari konteks implementasi kebijakan melihat seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang ikut serta terlibat dalam implementasi suatu

kebijakan. Yang mana dalam melakukan implementasi sebuah kebijakan sangat membutuhkan atau memerlukan sebuah memperhitungkan soal adanya kekuatan atau kekuasaan, *interest*, serta taktik ataupun strategi yang dipergunakan oleh para aktor dalam memperlancar proses pelaksanaan dari adanya kebijakan.

2) Selanjutnya yakni tentang karakteristik lembaga atau penguasa, dalam hal ini terkait suatu keberadaan rezim politik atau institusi yang memang sedang berkuasa pada saat itu. Dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa lingkungan sebagai tempat penerapan kebijakan itu memiliki suatu daya pengaruh atas keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu pada poin ini diuraikan terkait bagaimana karakteristik institusi atau penguasa yang sedang duduk di kursi kekuasaan akan ikut serta dalam memberikan pengaruh terhadap adanya *policy* atau kebijakan.

3) Daya tanggap atau tingkat kepatuhan kelompok, mengenai poin ini bahwasanya kebijakan yang diimplementasikan pelaksana dan adanya suatu tanggapan terhadapnya tersebut menjadi aspek yang penting dalam suatu kebijakan. Sehingga perlu untuk dilakukan peninjauan bagaimana kepatuhan dan tanggapan terhadap suatu kebijakan.

Sehingga dalam model Grindle tersebut mengenai implementasi kebijakan telah dengan jelas bahwa suatu kebijakan memiliki suatu tujuan (*goals*) yang hendak dicapai yang mana dari adanya sebuah tujuan kebijakan lalu diformulasikan ke dalam program-program aksi atau suatu proyek tertentu yang mana telah dirancang dan tentunya dibiayai atau telah didanai. Secara garis besar implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konten dan konteks. Sehingga nanti hasilnya dapat diukur berdasarkan tujuan kebijakan terhadap dampaknya ke masyarakat, individu atau kelompok bagaimana dan perubahannya serta diterimanya implementasi kebijakan bagaimana. Sejatinya dalam hal ini pada tahap pengambilan keputusan kebijakan berkaitan erat dengan pelaksana kebijakan yang memainkan peran penting, tetapi juga tidak terlepas adanya dinamika tanggapan masyarakat sebagai kelompok sasaran, hubungan

kekuasaan, adanya persaingan individu maupun kelompok. Yang menjadi kekhawatiran dalam hal ini adalah mengenai saran teknis, dampak, arti perubahan, stabilitas dan dukungan politik serta hubungan (Grindle & Thomas, 2016:222).

Demikian pula terdapat hambatan yang seringkali timbul di permukaan ketika kebijakan telah terlasana, seperti halnya tidak adanya atau minimnya suatu kerjasama vertikal yang dimaksudkan adalah antara atasan dengan bawahan tidak berjalan baik, kemudian hubungan kerja yang cenderung horizontal dan tidak sinergis serta adanya penolakan yang datang dari masyarakat atau kalangan pemerintah atau birokrasi sendiri mengenai muatan kebijakan. Apalagi ketika ada batasan otonomi untuk mengambil keputusan terkait kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada sesuai dengan kehendaknya tentu menjadi permasalahan berkepanjangan(Grindle, 1980:207). Singkatnya pada model Grindle ini memiliki keterbatasan tentang keberhasilan implementasi dari segi dampak relatif sulit diidentifikasi karena perubahan pada individu dalam masyarakat diketahui setelah periode waktu yang panjang. Meskipun begitu, model implementasi kebijakan ini tidak sekedar mekanisme penjabaran keputusan, tetapi lebih dari pada itu kelebihanannya menyangkut tentang konflik, keputusan dan sasaran kebijakan.

Secara lebih lanjut dalam model Grindle ini dalam mengukur kinerja keberhasilannya harus secara betul menyimak variabel kebijakan yang ada, lingkungan dan organisasi. Sehingga perhatiannya perlu untuk dikerahkan agar masyarakat dapat memberikan partisipasi serta kontribusi untuk mendukung keberhasilan kebijakan. Karena sebaik apapun kebijakan telah disusun tetapi pelaksana dalam hal ini masyarakat tidak mampu untuk menginterpretasikan kebijakan tersebut maka akan mengalami kegagalan. Sumber daya manusia adalah faktor kunci penentu keberhasilan sehingga perlu pemahaman yang memadai agar dapat melaksanakan kebijakan tersebut. Keberhasilan suatu kebijakan tidak semata-mata karena alasan rasionalitas

saja, melainkan juga kemampuan dari pelaksana untuk memahami serta merespon keinginan dari kelompok kepentingan sehingga perlu untuk melakukan pendekatan baik itu bottom up dan top down agar seimbang.

Mengingat ketika kebijakan telah terpilih, perlu adanya organisasi pelaksana, yang mana dalam hal ini memiliki suatu otoritas untuk melaksanakan kewenangannya sesuai amanat kebijakan dan juga berbagai jenis sumber daya untuk dapat memberikan dukungan perihal keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Untuk lingkungan, ini juga menjadi indikator penting, positif maupun negatifnya lingkungan sangat berpengaruh pada hasil implementasi kebijakan. Terlebih lagi juga sangat perlu memperhatikan tingkat kepatuhan, baik kepatuhan birokrasi terhadap atasannya atau tingkatan birokrasi hingga kepatuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran, dengan mempertimbangkan implementasi kebijakan apakah berjalan dengan baik atau tidak. Apakah berdampak pada terarahnya suatu program atau kebijakan.

Dari penjelasan tersebut, peneliti memilih menggunakan teori Grindle sebagai pisau analisis untuk melaksanakan penelitian karena lebih komprehensif dalam meneliti permasalahan dan juga model ini memiliki keunikan dari segi pemahaman yang mana terkait dengan konteks implementasi, implementator, penerima implementasi, konflik serta kondisi sumber daya yang diperlukan. Dalam hal ini, sebagai peneliti yang telah melalui proses tahapan penelitian memiliki keinginan untuk memandang dan melakukan peninjauan bagaimana dampak dari sentralisasi perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Wonogiri. Peneliti mempunyai kehendak untuk melihat apa yang terjadi perihal izin tambang di Wonogiri dan juga ingin melakukan analisa secara kritis karena perizinan pertambangan di alihkan ke pusat.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Implementasi Kebijakan

Pada kali ini dapat dikatakan bahwasanya implementasi merupakan proses antara administrasi dan politik, sehingga suatu proses kebijakan akan dimulai jika memiliki *goals* dan sasaran yang awalnya memiliki sifat secara general terperinci, ada suatu aksi melalui sebuah program yang dirancang, dan mencakup pada biaya yang dialokasikan. Pada dasarnya, tugas atau pekerjaan dari adanya implementasi adalah membangun suatu hubungan-hubungan untuk mempermudah *goals* dari kebijakan agar dapat direalisasikan sebagai hasil dari suatu aktivitas pemerintah, menurut Grindle dalam (Kurniadi dkk, 2019:572). Yang mana tingkat keberhasilannya kebijakan bergantung pada kegiatan yang telah dikonsepsikan dan juga terkait pendanaan yang memadai, selain dipengaruhi oleh isi suatu kebijakan dan konteks pengimplementasiannya. Di lain sisi kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda satu sama lain cenderung sulit diimplementasikan.

Dalam implementasi kebijakan diharapkan masyarakat dapat memahami betul dan dapat melaksanakan sesuai arahan pelaksana kebijakan. Implementasi merupakan pelaksanaan dari rencana yang sudah dirumuskan bersama dengan matang dari sekian lama sehingga telah terdapat adanya keputusan serta kejelasannya. Dengan adanya implementasi sudah tentu menimbulkan dampak dan akibat, terlebih hasil yang diperoleh apa telah sesuai dengan harapan yang ada ataukah sebaliknya, sebab juga tidak jarang bahwa implementasi ini mengalami ketidaksesuaian dengan rencana yang dirancang bersama. Sehingga pada tahap implementasi adalah dapat dikatakan secara teknis untuk menguji penerapan suatu kebijakan yang telah tertuang dalam rencana yang disusun.

Pengimplementasian selau berhubungan dengan kebijakan atau *policy* yang merupakan serangkaian dari adanya kehendak atau suatu kegiatan yang menjadi inisiatif oleh kelompok/individu/pemerintah, berupa konsep dan asas yang menjadi basis pemikiran atau sebagai pedoman pada usaha untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Ide dari adanya sebuah

kebijakan tidak dapat dilepaskan dari pola tingkah laku yang mempunyai maksud serta tujuan karena bagaimanapun sebuah kebijakan harus menampilkan apa yang telah dikerjakan secara sungguh-sungguh dari pada sekadar hanya pengusulan semata. Mudah dipahami bahwa kebijakan bernuansa politis, tetapi pelaksanaannya tidak sekedar berdasar keputusan saja, tetapi bagi mereka yang berkepentingan (Kurniadi, dkk, 2019:572). Dalam hal ini menghimpun kepentingan banyak orang tidak sekadar segelintir orang.

1.6.2 Pemerintah dan Pemerintahan

Pemerintahan adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari studi ilmu politik karena bersinggungan dengan kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan jantung dari studi ilmu politik (Labolo, 2014:17). Pemerintah sendiri merupakan suatu wadah yang berisikan kekuasaan untuk melakukan sebuah pengaturan di wilayah, atau juga dapat dikatakan sebagai organisasi yang memikul suatu tanggung jawab yang besar untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat luas dan memiliki kuasa untuk menjalankan kewenangan guna mengatur kehidupan di berbagai sektor. Sejatinya pemerintah itu dibagi menjadi 2 (dua) entitas yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dibagi levelnya baik provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa sekalipun. Keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam menjalankan suatu pemerintahan. Pembedanya hanya luas wilayah dan kewenangannya, pada intinya keduanya itu saling melakukan koordinasi. Melakukan pengaturan pada bidang pendidikan, sosial, politik hingga ekonomi pada suatu negara beserta bagiannya. Sehingga dalam hal ini secara ringkas pemerintah itu merupakan organisasi yang terdiri dari sekelompok orang memiliki kuasa dan menjalankan topoksinya untuk melakukan tata kelola sistem pemerintahan dan melakukan penetapan kebijakan dengan tujuan untuk menggapai impian atau harapan bersama guna terwujudnya iklim keteraturan.

Pemerintah pusat memiliki kedudukan tertinggi dan berada di Ibukota Negara sehingga disebut sebagai pemerintah nasional, sedangkan untuk pemerintah daerah disebut sebagai subnasional. Dalam hal ini pemerintah pusat merupakan salah satu alat penyelenggara sistem pemerintahan yang merujuk pada otoritas secara administratif dalam suatu negara yang jaungkauannya luas, sedangkan pemerintah daerah sebaliknya. Negara sendiri terdiri dari provinsi, provinsi masih terbagi menjadi kabupaten/kota lebih sempit lagi kabupaten/kota masih terbagi menjadi kecamatan dan desa. Masing- masing dari tingkatan tersebut terdapat suatu sistem pemerintahan untuk mengelola dan mengatur segala potensi yang ada dan menjalankan pemerintahannya sesuai asas-asas demokrasi. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh gubernur, walikota, dan bupati sebagai penyelenggara pemerintahan.

1.6.3 Perizinan

Berbicara soal izin, bahwasanya izin dapat dikatakan sebagai persetujuan. Dalam konteks politik merupakan pernyataan keputusan dari adanya suatu permohonan kepada pemimpin yang mana jika didasarkan pada regulasi atau peraturan baik itu berupa undang-undang ataupun yang lainnya memuat ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pihak pemerintah baik itu dari berbagai level guna menjalankan pemerintahannya. Perizinan ini dapat diartikan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha usaha(Nugroho&Haryani, 2021:17). Secara singkat, mengenai perizinan bahwasanya dapat dipahami secara meluas, izin ini sejatinya dapat dimaknakan sebagai bentuk pembebasan terhadap suatu larangan yang memang telah ditetapkan secara sah. Pada dasarnya dengan perizinan maka pemerintah memiliki sebuah fungsi kontrol, melakukan pengendalian untuk kegiatan-kegiatan yang hendak dilakukan, seperti pertambangan baik itu oleh masyarakat atau perusahaan. Untuk macamnya pun dapat berupa suatu keterangan surat rekomendasi, sertifikasi penentuan kuota atau izin untuk melakukan suatu usaha, maupun lain-lain. Dengan adanya sebuah perizinan maka pemerintah

selaku pihak yang berwenang dan memiliki otoritas memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Yang sebetulnya ada pelarangan karena memperhatikan kepentingan publik. Meskipun begitu bisa dilakukan dengan adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah

1.6.4 Masyarakat

Masyarakat diartikan sebagai sebuah himpunan sekelompok orang yang hidup bersama di wilayah tertentu, bertempat tinggal di dalam kurun waktu yang panjang, yang mana diantara satu sama lain memiliki ketergantungan karena sejatinya individu itu makhluk sosial yang membutuhkan. Sekelompok orang kemudian disebut sebagai masyarakat yang mana memiliki hubungan yang erat dan terdapat beberapa kesamaan seperti perasaan, sikap, tradisi dan budaya. Masyarakat terbentuk karena adanya sebuah perasaan dan pikiran untuk berinteraksi satu sama lain, karena sebenarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang mana saling membutuhkan dengan yang lainnya dan tidak dapat hidup secara mandiri (Prasetyo & Irwansyah, 2020:164). Masyarakat ini baik yang bertempat tinggal di perkotaan maupun pedesaan sejatinya merupakan satu kesatuan yang memiliki ciri khas sebagai pengikat dan pembeda dengan yang lainnya. Misalkan di perkotaan masyarakatnya egoistis, intoleran dan cenderung mandiri sedangkan masyarakat desa itu toleransinya tinggi, mengedepankan kebersamaan dan gotong royongnya sangat kental. Itu merupakan perbedaan yang mencolok secara general dilihat dari lingkup wilayah.

Dalam hal ini, sejatinya manusia yang hidup berkelompok disebut sebagai masyarakat yang hidup di wilayah tertentu, mereka memiliki sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhannya baik itu sandang dan pangan dan juga berupaya untuk mencari jalan bagaimana caranya menyatukan banyak kepala menjadi satu atau sepemikiran sehingga terbentuklah sebuah rumusan-rumusan yang menjadi dasar pedoman bersama. Selain itu pula di masyarakat juga

tidak bisa terlepas dari kelas sosial atau stratifikasi kelas yang berdasarkan atas usia, pendidikan, dan aspek lainnya yang memicu keragaman.

1.6.5 Pertambangan

Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral mineral dan batubara yang tahapannya meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengakutan beserta penjualan dan yang terakhir adalah kegiatan pasca tambang. Pertambangan adalah kegiatan yang mengambil bahan galian dalam perut bumi sehingga termasuk ke dalam sumberdaya yang tidak terbaharukan dan dikuasai oleh negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kegiatan ini bernilai ekonomis dan padat investasi, bahkan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian dan pembangunan nasional akan tetapi berpotensi besar dalam merusak alam dan seringkali menimbulkan konflik sosial.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Banyak sekali fenomena yang problematis seiring dengan perkembangan peradaban manusia, salah satunya kebijakan izin tambang sehingga perlu untuk dipandang penting guna menemukan jawaban dengan berpikir kritis melakukan penyelidikan dengan penuh kehati-hatian melalui sebuah penelitian dimulai menyusun langkah-langkah yang logis untuk mendapatkan data-data valid sehingga nanti mampu mendapatkan hasil yang tepat dan benar. Dalam melakukan proses penelitian ini, peneliti menggunakan suatu metode kualitatif, yang menekankan pada suatu siasat yang inquiri dan lebih tertuju pada sebuah pencarian suatu maksud, penjelasan dari sebuah konsepsi, karakter, gelagat, hingga adanya petunjuk maupun deskripsi tentang fenomena yang diteliti, fokus serta tentunya multi metode memiliki sifat

alamiah dan dengan menggunakan cara pandang yang luas dalam memaknai persoalan, secara sederhana penelitian dengan metode ini bertujuan untuk mendeteksi sebuah jawaban yang diinginkan peneliti dari suatu realitas fenomena yang terjadi melalui tahapan atau prosedur secara ilmiah dan yang pasti bersistem(Sidiq dan Choiri, 2019:4).

Penelitian dengan metode kualitatif ini memakai *background* secara natural yang memiliki suatu maksud untuk menafsirkan suatu fenomena kebijakan izin usaha pertambangan pasca terjadinya sentralisasi dengan melakukan elaborasi beberapa metode diantaranya wawancara, dan studi dokumen atau studi pustaka. Creswell, J.W melakukan pencatatan bahwasanya untuk metode kualitatif sudah sepantasnya hasil penelitiannya dibuat dengan detail dan sudah pasti harus jelas(Creswell, J.W. 2013:102). Maka dengan itu, dijabarkan sebagai berikut,(1) perihal daftar pertanyaan untuk penelitian dan fokusnya, yang mana sebagai peneliti diharuskan berfokus pada sebuah fenomena yang menjadi target penelitian untuk dijadikan sebagai motif kehendak dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian;(2)melakukan penyusunan tentang referensi untuk landasan berpikir, maupun dapat dikatakan sebagai paradigma yang menjadi landasan teorinya;(3) membuat perencanaan perihal pendekatan sebuah penelitian yang mana bisa memberi sumbangsih perihal gambaran yang jelas tentang arah penelitian yang dilakukan;(4)lebih lanjut adalah soal lingkup cakupan penelitian dan kondisinya secara jelas;(5) cara menghimpun dan melakukan klarifikasi terkait data -data yang ada diperoleh saat penelitian berlangsung;(6)melakukan peninjauan atau melakukan pengoreksian terhadap kebenaran suatu data dan yang terakhir;(7) melakukan teknik analisis data secara kritis.

Perihal *problem* yang di angkat oleh peneliti di dalam muatan penelitian ini sifatnya tidak permanen dan nantinya berpotensi mengalami perkembangan ketika seorang peneliti bertindak secara langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian. Pada saat pra penelitian

dan pasca penelitian ada berbagai tahapan yang sejatinya perlu untuk diperhatikan oleh seorang peneliti, diantaranya yakni mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh peneliti guna melakukan penelitian, kemudian peneliti harus memiliki segala upaya dengan mengerahkan baik itu tenaga, daya serta usaha agar persiapan yang dilakukan maksimal sehingga siap untuk menghadapi keadaan tempat penelitian yang akan dijadikan sebagai tujuan penelitian. Lebih lanjut tentang melakukan sebuah analisis dari data hasil dari sebuah penelitian yang telah dijalankan dan melakukan penulisan sebuah laporan hasil dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Yang mana dari didapatkannya data-data itu baik berupa kata-kata dan gambar kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, ingat bukan angka seperti halnya penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini, antara peneliti dengan realita memiliki sebuah hubungan yang sifatnya interaktif dan bukan pasif dengan memformulasikan teori bukan menguji kebenaran suatu teori.

Melalui penelitian kualitatif ini, seyogyanya memiliki sebuah tujuan yang dapat dilihat dari beberapa hal (Fadli, 2021:36), seperti penggambaran obyek suatu penelitian yang dapat dilakukan dengan cara dipotret, video, diilustrasikan hingga dinarasikan, kemudian mengungkap makna dibalik adanya suatu fenomena yang terjadi, dan menjelaskan fenomena yang terjadi secara detail dan sistematis. Dengan ini sebelum melakukan penelitian maka seorang peneliti wajib memahami betul seluk beluk penelitian kualitatif dan memahami karakteristiknya yang memiliki latar alamiah, peneliti sebagai instrument kunci dalam melakukan penelitian sehingga harus berperan aktif, kemudian penelitian kualitatif ini sejatinya lebih menekankan pada sebuah proses bukan sekadar hasil, bersifat deskriptif, analisis yang dilakukan itu secara induktif dan lebih berfokus pada makna dari penelitian yang telah usai dijalankan.

Kemudian dalam penelitian metode kualitatif ini di Kabupaten Wonogiri peneliti ingin mengetahui apa yang tampak mengenai gejala atau fenomena yang menjadi pengalaman manusia sehingga bisa dibuat menjadi suatu pedoman dalam bertindak ketika menjalankan penelitian. Terlebih lagi pendekatan ini dilaksanakan pada situasi dan kondisi yang alamiah (*natural setting*) sehingga dapat dikatakan tidak ada unsur manipulatif, serta bagi peneliti tidak memiliki sebuah batas untuk mencoba memaknai dari adanya fenomena yang terjadi dan lebih leluasa dalam melakukan analisa terhadap aktivitas penelitian dan hasilnya yang di dapat dari lapangan. Untuk penelitian ini berfokus pada dampak sentralisasi perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Wonogiri.

Peneliti menggunakan sebuah metode kualitatif melakukan sebuah analisis yang deskriptif serta intropektif dari suatu kedalaman semua bentuk dari adanya kesadaran dan tentunya pengalaman langsung meliputi indrawi, konseptual, moral, estetis, dan religious. Artinya lebih memposisikan suatu daya sadar manusia dan maknanya secara subjektifnya sebagai sebuah fokus guna melakukan pemahaman terkait tindakan sosial. Dengan ini peneliti mampu mempelajari cara memahami suatu peristiwa atau gejala dalam keadaan sadar tanpa adanya dorongan dari pihak lain atau paksaan. Maka karenanya seorang peneliti memiliki peran yang sangat urgensi untuk melakukan pola interaksi, komunikasi, dan partisipasi. Terkhusus pada intensionalitas psikis yang telah diketahui secara sadar dihubungkan dengan dunia itu sendiri. Dengan menggunakan pendekatan ini maka peneliti akan menampilkan semua secara *real* dengan membuka adanya suatu realitas sosial yang terjadi di lapangan. Lebih menggunakan suatu pengalaman hidup untuk mencoba memahami tentang keadaan politik, sosial, budaya, maupun konteks sejarah dimana pengalaman tersebut terjadi (Samsu, 2017:71). Dalam hal ini, peneliti harus sedia mengesampingkan pengalaman pribadinya untuk memahami pengalaman informan yang diteliti.

1.7.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini memiliki sebuah fokus yakni untuk lebih dalam membongkar bagaimana dampak dari sentralisasi perizinan usaha pertambangan bagi usaha tambang di Kabupaten Wonogiri. Karena kewenangan izin pertambangan diambil alih oleh Pemerintah Pusat per-tahun 2020 lalu. Sehingga ini menjadi perhatian serius, kemungkinan besar dalam pengimplementasian kebijakan perizinan tidak berjalan linear melainkan berdinamika. Maksud dari dinamis adalah terkait adanya *interest* baik pemerintah atau masyarakat dalam menjalankan sebuah kebijakan, karena sampai saat ini masih terdapat banyak aktivitas atau kegiatan pertambangan tanpa perizinan resmi. Ini akan mempunyai dampak yang tidak baik jika aktivitasnya terus dijalankan tanpa mengupayakan adanya sebuah perizinan. Kemudian dari pengawasan, peran lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk mengkondusifkan penambang. Sehingga dari hal ini, peneliti memiliki keinginan untuk mengetahui kondisi pertambangan di Kabupaten Wonogiri, sejauh mana garis komunikasi dan koordinasi antara lembaga terkait dan juga masyarakat. Terakhir adalah terkait aktor-aktor yang terlibat dalam pertambangan di Kabupaten Wonogiri pasca sentralisasi kewenangan perizinan usaha tambang.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian tentang izin usaha tambang di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pemilihan tempat penelitian ini mempertimbangkan bahwa Kabupaten Wonogiri menyimpan potensi pertambangan yang besar baik bahan galian B dan bahan galian C. Namun di dominasi oleh PETI (Pertambangan Tanpa Izin) baik itu tambang rakyat hingga tambang yang dijalankan oleh badan usaha atau perusahaan. Karena terjadi sentralisasi kewenangan perizinan usaha tambang, peneliti ingin melihat bagaimana kondisi tambang beserta aktor-aktor dalam sektor pertambangan.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

Segala catatan kumpulan informasi atau keterangan dari berbagai sumber mengenai sebuah fakta dan realita terkait penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini relevan dengan pengkajian penelitian, ini dapat dimaksudkan sebagai data. Pada kali ini sumber data menjadi hal yang krusial bagi peneliti untuk mengetahui asal data yang diperoleh sehingga memiliki kejelasan bukan rekayasa semata. Terdapat dua klasifikasi sumber data pada penelitian yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah:

1. Data pokok atau primer

Data pokok ini juga dapat dibilang sebagai data utama dalam melakukan penelitian, untuk mencari data pokok seorang peneliti harus melakukan aksi dengan turun ke tempat yang hendak diteliti untuk mendapatkan informasi akurat melalui sumber-sumber yang terpercaya dengan secara langsung tanpa melalui perantara dengan tujuan menggali informasi terkait topik yang diteliti yakni mengenai “Dampak Sentralisasi Perizinan Pertambangan (UU Minerba 2020) Bagi Usaha Tambang di Kabupaten Wonogiri. Data primer dapat dikatakan merupakan hasil langsung dari sumber pertama baik dilakukan dengan observasi maupun wawancara. Yang kemudian dikumpulkan dan diolah oleh peneliti untuk dituangkan ke dalam hasil penelitian. Dalam memperoleh data primer ini, subjek yang digunakan oleh peneliti diantaranya:

1. Bapak Pugu Direktorat Mineral dan Batubara, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara
2. Bapak Norman Hidayat, Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Kementerian Investasi
3. Bapak Yulianto, Kepala Seksi Bidang Mineral dan Batubara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara Provinsi Cabang Sewu Lawu di Kabupaten Wonogiri
4. Bapak Adityo Bagus Wicaksono Pengusul Paguyuban Tambang Kabupaten Wonogiri

5. Bapak Sarto selaku Ketua Paguyuban Tambang Rakyat

2. Data sekunder

Untuk data sekunder dapat dikatakan perolehannya melalui perantara jadi tidak didapatkan secara langsung seperti halnya data primer. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan memperkaya sumber data primer. Dalam melakukan penelitian ini peneliti akan memerlukan segala bentuk referensi baik itu berupa undang-undang, buku, artikel, jurnal, hingga situs internet yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan sudah pasti tidak hanya itu namun juga bentuk-bentuk tertulis lainnya untuk mengkokohkan basis penelitian yang dikaji dan untuk memenuhi informasi yang telah dikumpulkan.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan terhadap data yang diperoleh dari penelitian adalah hal yang wajib dan harus dilakukan oleh seorang peneliti karena sangat penting untuk memperoleh informasi dan berperan penting untuk menentukan sejauh mana keberhasilan terhadap penelitian yang telah dijalankan. Maka dari itu seorang peneliti harus menggunakan teknik untuk mengumpulkan data secara tepat untuk mendukung tingkat berhasilnya suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih penggunaan teknik pengumpulan data diantara berupa interview atau wawancara dan studi pustaka. Secara lebih lebih, akan diuraikan dibawah ini:

a. Wawancara, menurut Moleong dalam Sidiq dan Choiri (2019:59) dapat dijelaskan sebagai sebuah percakapan yang mempunyai maksud tertentu dan umumnya dilakukan oleh dua pihak yakni peneliti dan pihak yang hendak di wawancara atau informan. Pada intinya wawancara ini merupakan sebuah proses dalam melakukan pengumpulan data secara interaktif untuk tujuan tertentu dengan tanya jawab kepada seseorang sebagai narasumber dalam

penelitian. Secara pasti ketika kegiatan ini berjalan, seorang peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait topik penelitian yang dibahas kepada narasumber yang *concern* terhadap topik tersebut. Setelahnya pihak narasumber akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan melalui sebuah proses komunikasi dengan berhadapan muka setidaknya dua orang. Meskipun begitu juga terdapat interaksi antara keduanya baik peneliti dan narasumber yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi.

Sebab wawancara bukanlah sebuah metode wawancara yang pasif, melainkan interaktif yang mana antara peneliti dan narasumber keduanya memiliki kepentingan dan tujuan. Dasar dari pelaksanaan wawancara ini adalah ketersediaan, yang arah pembicaraannya berdasarkan topik yang digunakan dalam penelitian oleh peneliti dan mengacu pada tujuan yang ditetapkan. Dalam wawancara, terdapat tiga variasi yakni terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur (Sidiq dan Choiri, 2019:63). Untuk wawancara terstruktur digunakan apabila peneliti mengetahui secara pasti mengenai informasi apa yang nantinya didapatkan, sehingga mempersiapkan pertanyaan secara tertulis dengan alternatif jawaban.

Lain halnya dengan wawancara semi terstruktur yang mana ini masuk dalam kategori *in-depth interview*, pada variasi ini pelaksanaannya menggunakan pedoman wawancara namun cenderung bebas dengan tujuan untuk menjumpai suatu masalah dengan lebih gamblang sebab pihak yang diwawancarai dimintai suatu perspektif tanggapan sehingga seorang peneliti harus mendengar, mencermati secara seksama terkait apa yang disampaikan oleh narasumber. Lebih lanjut yakni wawancara tidak terstruktur, atau dikatakan bebas karena seorang peneliti itu tidak memerlukan adanya pedoman wawancara secara sistematis, melainkan hanya *design* permasalahan yang hendak dipertanyakan kepada narasumber. Dari ketiga variasi tersebut setelah ditelisik peneliti akan lebih condong memakai sebuah metode wawancara yakni semi terstruktur, karena pada metode ini seorang peneliti hanya perlu menyiapkan pertanyaan kunci untuk dipersoalkan guna sebagai panduan dalam melakukan wawancara kepada narasumber

dan nanti bisa dilakukan pengembangan menyesuaikan kebutuhan peneliti saat menggali sumber informasi.

b. Studi kepustakaan, ini adalah suatu metode penelitian dengan maksud untuk mendapatkan berbagai sumber informasi yang akan digunakan sebagai informasi pendukung. Perolehannya dapat melalui penelitian sebelumnya yang memang dapat dikatakan memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Melalui studi pustaka peneliti juga menelaah berbagai literatur yang ada digunakan sebagai referensi dan untuk bahan kajian teoritis. Sumber studi pustaka yang diperoleh melalui sumber tertulis seperti artikel dari media *online*, buku fisik atau non-fisik (*e-book*), jurnal, skripsi, tesis hingga disertasi.

1.7.6 Analisis Data

Pada tahap analisis data, ini merupakan sebuah tahap untuk melakukan pemahaman, penjelasan, penafsiran dan mencari adanya hubungan dari adanya perolehan data – data hasil dari aksi peneliti untuk melakukan turun lapangan yang kemudian dilakukan pengembangan. Dalam analisis data ini seyogyanya berperan penting untuk menentukan kesahihan dari hasil penelitian yang dikaji. Setelah data-data yang ada terkumpul kemudian dilakukan pemilahan, ini dimaksudkan untuk menyesuaikan terkait topik yang diteliti agar hasilnya tidak keluar konteks. Ringkasnya, pada tahap ini yakni analisis dilakukan oleh peneliti sesuai memperoleh data-data dari narasumber penelitian yang memang dibutuhkan. Berikut adalah langkah-langkah analisis data Miles dan Huberman yang mana kerap sekali dipakai dalam suatu metode penelitian kualitatif, dikenal namanya sebagai teknik analisis *flow chart analysis* (Sidiq & Choiri, 2019:78);

1. Reduksi data, masuk pada tahap ini seorang peneliti melakukan reduksi terhadap data atau melakukan penyortiran dengan segala informasi yang diperolehnya dari penelitian agar

lebih fokus pada apa yang diteliti sehingga nantinya hasil tidak general. Pada intinya reduksi data ini melakukan rangkuman terhadap hal-hal yang sifatnya penting dan menyingkirkan hal-hal yang peneliti anggap tidak penting. Sehingga dari adanya reduksi data ini semakin memberi kemudahan pada peneliti untuk memberikan suatu gambaran yang jelas terhadap topik yang diteliti sehingga lebih mudah ditemukan apabila diperlukan. Dari reduksi data ini peneliti menghasilkan temuan yang dianggap asing dan memiliki pola sehingga ini menjadi perhatian.

2. Penyajian data, dilakukan setelah melakukan reduksi data. Dalam tahap penyajian data ini peneliti melakukan pengumpulan informasi dalam bentuk uraian yang disusun sehingga memberi kemungkinan adanya suatu penarikan sebuah kesimpulan. Peneliti mengusahakan merangkai suatu informasi yang dilakukan secara terorganisir untuk menggambarkan kesimpulan dan tentu guna mengambil adanya tindakan. Yang mana biasanya penyajiannya menggunakan teks naratif.

3. Kesimpulan atau verifikasi yakni kegiatan merumuskan kesimpulan hasil dari penelitian baik itu berupa kesimpulan yang sifatnya sementara ataupun kesimpulan akhir yang berpedoman pada kajian penelitian.

Nantinya pada penelitian yang telah usai dilakukan oleh peneliti, akan digunakan sebuah teknik analitis narasi. Tujuannya adalah untuk melakukan penjabaran dari banyaknya data yang telah didapatkan melalui penelitian turun lapangan. Peneliti akan melakukan transkrip hasil wawancara dan dibaca secara menyeluruh kemudian dilakukan analisa dengan melakukan peng-interpretasian secara teoritis, atau secara sederhananya dapat dikatakan dengan melakukan sebuah rasionalisasi antara fenomena yang ada dan penemuan data dengan konseptual teoritis yang digunakan sebagai pijakan berpikir peneliti. Terlebih lagi, nantinya peneliti akan menggunakan data sekunder untuk menunjang hasil yang didapat dan memperkaya pengetahuan peneliti sehingga nanti akan dilakukan analisa melalui literatur atau pustaka yang

relevan dengan topik yang diangkat dengan sebuah harapan, data-data yang diperlukan peneliti akan melimpah dan juga akurat. Yang kemudian akan dibaca dan diinterpretasi menggunakan kajian teori guna mendapatkan suatu jawaban dari rumusan pertanyaan dalam penelitian.